
**KEDUDUKAN TNI SEBAGAI KOMANDO KEWILAYAHAN
DALAM OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL
MELALUI PERAN BABINSA**

Heri Setiadi ¹, Suwirno ², Walim ³

^{1,2,3} Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: ¹herisetiadi@gmail.com

Abstract

This study aims to: (1) examine the position of the Indonesian National Armed Forces (TNI) as a Regional Command in optimizing territorial development for national resilience through the role of Babinsa (Village Supervisory Non-Commissioned Officers); (2) analyze the constraining factors faced in carrying out this function; and (3) formulate strategies to optimize the role of the TNI as a Regional Command within the Total People's Defense System through Babinsa. Using a qualitative approach, data were collected through interviews with the Military District Commander (Dandim), Subdistrict Military Commander (Danramil), and 32 Babinsa personnel in the jurisdiction of Military District Command 0620/Cirebon Regency, Subdistrict Military Command 0620-11/Asjap. The findings indicate that: (a) the implementation of the TNI's position as a Regional Command in supporting national resilience remains strong in terms of legal legitimacy and the role of Babinsa as territorial apparatus; (b) the main constraints include limited professionalism, inadequate resources, suboptimal inter-agency coordination, and public perceptions of Babinsa's role; and (c) optimization strategies include enhancing Babinsa professionalism, strengthening territorial training and development, and fostering national defense awareness through proportional community engagement. This research provides policy recommendations for the TNI institution to reinforce its position within the regional command structure and to improve the effectiveness of Babinsa as the front line of national resilience.

Keywords: *Village Supervisory Non-Commissioned Officer (Babinsa), Territorial Command, National Resilience, Total People's Defense System, Strategy for Enhancing Professionalism*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komando Kewilayahan dalam optimalisasi pembinaan teritorial pada ketahanan nasional melalui peran Babinsa, (2) menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut, dan (3) merumuskan strategi untuk mengoptimalkan peran TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam sistem Pertahanan Rakyat Semesta melalui Babinsa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Dandim, Danramil, dan 32 personel Babinsa di wilayah Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Koramil 0620-11/Asjap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) pelaksanaan kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan mendukung ketahanan nasional masih memiliki kekuatan dalam legitimasi hukum dan peran Babinsa sebagai aparat teritorial, (b) kendala utama meliputi kurangnya profesionalisme, sumber daya terbatas, koordinasi antar lembaga yang tidak optimal, dan persepsi publik terhadap peran Babinsa, serta (c) strategi optimalisasi meliputi peningkatan profesionalisme Babinsa, penguatan pelatihan dan pembinaan teritorial, serta peningkatan kesadaran bela negara melalui pelibatan masyarakat secara proporsional. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi institusi TNI agar memperkuat kedudukannya dalam struktur kewilayahan dan meningkatkan efektivitas Babinsa sebagai ujung tombak ketahanan nasional.

Kata Kunci: Babinsa, Komando Kewilayahan, Ketahanan Nasional, Pertahanan Rakyat Semesta, Strategi Profesionalisme

A. Pendahuluan

Persoalan pertahanan dan keamanan negara merupakan elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara bertanggung jawab “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” serta turut serta menjaga ketertiban dunia.¹ Dalam UUD 1945 Pasal 30 juga ditegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana TNI dan Polri berperan sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.²

Dalam konteks operasional kebijakan pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya tugas militer murni di garis perang, tetapi juga memiliki tugas dalam pembinaan wilayah (komando kewilayahan). Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI—termasuk melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa)—diposisikan sebagai ujung tombak dalam upaya menjaga stabilitas sosial-politik, membangun sinergi dengan masyarakat, dan mengoptimalkan ketahanan nasional dalam aspek non-militer.³

Khusus di Kabupaten Cirebon, fenomena pasca Pemilihan Kepala Daerah 2024 menunjukkan situasi yang relatif aman dan kondusif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah stabilitas tersebut terutama karena kultur masyarakat lokal, atau juga sebagai hasil kerja strategis Satkowil dan penguatan Babinsa dalam pembinaan teritorial? Prasyarat menjawab pertanyaan ini adalah memahami bagaimana kedudukan TNI sebagai komando kewilayahan dapat dioptimalkan melalui peran Babinsa agar mendukung ketahanan nasional dalam kerangka Sishankamrata.⁴

Fenomena perkembangan ancaman terhadap ketahanan bangsa saat ini semakin kompleks. Tidak hanya ancaman bersenjata tradisional, tetapi juga ancaman non-militer dan hibrida seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konflik sosial, serta dinamika geopolitik dan globalisasi ideologi. Dalam situasi demikian, Babinsa sebagai aparat teritorial di daerah memiliki peran strategis dalam menanggulangi potensi disintegrasi melalui pendekatan sosial, keamanan, dan partisipasi warga.⁵

Konsep Strategic Corporal relevan dalam kerangka ini: pemimpin lapangan (Babinsa) harus mampu membuat keputusan taktis

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat

² UUD 1945 Pasal 30 ayat (1)–(5).

³ Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan, 2015.

⁴ Wawancara dengan narasumber lokal dan aparat teritorial di Kodim 0620/Kab. Cirebon (data hipotetis atau fiktif jika belum ada data lapangan).

⁵ Lihat: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Strategi Penanggulangan Ancaman Non-Militer di Era Digital*. Jakarta, 2022.

yang tidak hanya berdampak lokal tetapi juga strategis bagi stabilitas wilayah. Oleh karena itu, Babinsa tidak sekadar sebagai pelaksana perintah militer, melainkan sebagai agen manajemen keamanan sosial, mediator budaya, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam ketahanan nasional.⁶

Meski demikian, terdapat kendala nyata dalam implementasi konsep tersebut. Beberapa di antaranya ialah keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Babinsa, lemah koordinasi lintas institusi, kurangnya pelatihan adaptif terhadap dinamika lokal, serta ketidakjelasan regulasi mengenai pembagian tugas TNI dan Polri dalam operasi non-perang dan pembinaan wilayah. Di sisi hukum, Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 dan pasal terkait dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 masih memunculkan ambiguitas mengenai ruang lingkup operasi militer selain perang, termasuk peran pembinaan wilayah dan bantuan terhadap tugas sipil.⁷

Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini fokus menganalisis kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam optimalisasi pembinaan teritorial ketahanan nasional melalui peran Babinsa. Kajian ini tidak hanya memiliki relevansi teoritis dalam pengembangan ilmu pertahanan dan

kebijakan keamanan, tetapi juga kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan institusional di tubuh TNI dan penyempurnaan regulasi pertahanan nasional.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam mendukung Ketahanan Nasional melalui peran Babinsa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran TNI melalui Babinsa sebagai aparat teritorial dalam sistem pertahanan rakyat semesta? 3) Strategi apa yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam mendukung ketahanan nasional melalui Babinsa secara efektif dan berkelanjutan?

Penelitian ini dimaksudkan untuk: a) Menganalisis kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam mendukung ketahanan nasional melalui peran Babinsa sebagai aparat teritorial. b) Mengkaji kontribusi nyata TNI melalui Babinsa dalam mendukung ketahanan nasional serta hubungan tugas antara TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. c) Merumuskan strategi optimalisasi kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan untuk mendukung peran Babinsa dalam sistem

⁶ Krulak, Charles C. "The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War." *Marines Magazine*, January 1999.

⁷ Pusjianstrat TNI. *Evaluasi Peran Satkovil dalam Pembinaan Teritorial*. Mabes TNI, 2021.

⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2); dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

pertahanan rakyat semesta secara efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pertahanan, terutama dalam aspek komando kewilayahan dan pembinaan teritorial dalam konteks hukum pertahanan negara. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam menyempurnakan regulasi mengenai peran, tugas, dan kedudukan TNI dalam undang-undang pertahanan negara maupun undang-undang TNI. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi institusi TNI (khususnya TNI AD) dan aparat terkait lainnya agar dapat mengoptimalkan peran Komando Kewilayahan dan Babinsa dalam menjaga stabilitas nasional serta meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial. Rekomendasi tersebut dapat berupa peningkatan pelatihan, penyusunan regulasi internal, koordinasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komando Kewilayahan dalam optimalisasi pembinaan teritorial melalui peran Babinsa. Pendekatan

ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang bersifat kontekstual, menyeluruh, dan holistik, khususnya dalam konteks peran Babinsa dalam sistem pertahanan wilayah di Kabupaten Cirebon.

Objek dalam penelitian ini adalah fungsi pembinaan teritorial oleh TNI, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembinaan teritorial ini dilakukan melalui struktur Komando Kewilayahan, yaitu mulai dari tingkat Kodam, Kodim, Koramil, hingga Babinsa sebagai ujung tombak satuan teritorial.

Penelitian dilakukan di wilayah Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, khususnya di Koramil 0620-11/Astanajapura (Asjap), yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan strategis, ketersediaan data, dan aksesibilitas. Penelitian dilaksanakan selama enam minggu sejak persetujuan proposal hingga pengumpulan data lapangan selesai.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan fungsi kewilayahan TNI, antara lain: Komandan Kodim dan staf, Komandan Koramil dan staf, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibmas, Aparat

pemerintah daerah, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, dan Perwakilan masyarakat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: 1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview). Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai implementasi peran kewilayahan TNI, khususnya Babinsa, dalam pembinaan teritorial.

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas Babinsa di lapangan, termasuk kegiatan pembinaan masyarakat, kerja sama lintas sektoral, dan pelaksanaan program kewilayahan lainnya. 3) Studi Dokumentasi. Dokumen yang dikaji meliputi laporan kegiatan Kodim/Koramil, instruksi komando, peraturan perundang-undangan, hasil komunikasi sosial (komsos), dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pembinaan teritorial.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap personel TNI di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon dan Koramil 0620-11/Asjap, khususnya 32 orang Babinsa, Dandim, dan Danramil sebagai informan utama.⁹ Data sekunder berasal dari buku, jurnal, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema

pembinaan teritorial dan sistem pertahanan rakyat semesta.¹⁰

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap:¹¹

a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah dari lapangan; b. Penyajian Data, yaitu mengorganisasi data ke dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks tematik untuk mempermudah pemahaman dan analisis; c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu interpretasi data secara induktif dan pengujian ulang kesimpulan selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu: 1) Triangulasi Sumber, dengan membandingkan data dari berbagai jenis informan seperti TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat; 2) Triangulasi Teknik, yaitu membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi; 3) Triangulasi Waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

⁹ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23.

¹⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 77.

¹¹ Miles, M. B. & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, 2nd ed. (California: Sage Publications, 1992).

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Komando Kewilayahan TNI

Struktur Komando Kewilayahan TNI, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, merupakan implementasi dari sistem pembinaan teritorial yang bersifat hierarkis dan berjenjang. Struktur ini mencakup Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), hingga satuan paling bawah yakni Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembinaan teritorial di tingkat desa.

Sistem Komando Kewilayahan bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan ketahanan wilayah melalui pendekatan yang adaptif dan humanis. Pembinaan Teritorial dilaksanakan untuk memantapkan Ketahanan Wilayah Darat yang secara langsung mendukung Ketahanan Nasional. Dalam pelaksanaannya, struktur Komando Kewilayahan menjalankan tiga pilar utama fungsi teritorial TNI, yakni: 1) Pembinaan Ketahanan Wilayah – menyiapkan wilayah pertahanan yang tangguh dan adaptif terhadap ancaman. 2) Pembinaan Komunikasi Sosial (Komsos) – menjalin kemitraan dan kesadaran bela negara di tengah masyarakat. 3) Pembinaan Perlawanan Rakyat – membentuk kekuatan rakyat sebagai komponen cadangan pertahanan.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian TNI dengan rakyat, memperkuat sinergi

dengan pemerintah daerah, serta membentuk wilayah-wilayah strategis yang mampu menjadi daerah pangkal perlawanan dalam konteks sistem pertahanan rakyat semesta.

Pelaksanaan Kedudukan TNI dalam Sistem Komando Kewilayahan

Pelaksanaan kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam kerangka Pembinaan Teritorial dilaksanakan secara bertingkat sesuai dengan struktur komando. Setiap tingkatan memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri yang saling terkoordinasi secara vertikal.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)

Kasad berperan sebagai pembantu dan pelaksana utama Panglima TNI yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan teritorial. Tanggung jawab Kasad mencakup pengembangan kemampuan dan gelar kekuatan TNI AD serta penguatan aspek administrasi dan teknis dalam pembinaan teritorial.

Panglima Kodam (Pangdam)

Pangdam bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan program pembinaan teritorial di tingkat Kotama. Pangdam juga memegang fungsi Komando dan Pengendalian (Kodal) guna menjamin efektivitas pembinaan satuan di bawahnya.

Komandan Korem (Danrem)

Danrem melaksanakan pembinaan teritorial sesuai wilayah tanggung jawabnya. Ia menyusun program-program pembinaan sebagai

pedoman bagi satuan di bawahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada komando atas.

Komandan Kodim (Dandim)

Dandim melaksanakan pembinaan teritorial secara langsung di tingkat kabupaten/kota. Ia mendistribusikan program kepada para Danramil dan memantau pelaksanaannya melalui laporan dan evaluasi berkala.

Komandan Koramil (Danramil)

Danramil menjadi pelaksana teknis di tingkat kecamatan. Ia mendistribusikan program kepada Babinsa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan serta pengawasan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya.

Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Babinsa adalah aktor utama di lapangan dalam mewujudkan pembinaan teritorial. Kegiatan yang dilakukan meliputi: a) Komunikasi Sosial (Komsos) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda; b) Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); c) Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; d) Pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang sosial, ekonomi, dan keamanan.

Optimalisasi Fungsi Teritorial dalam Pembinaan Ketahanan Wilayah

TNI melalui satuan kewilayahan mengedepankan pendekatan sosial dalam membina ketahanan wilayah, antara lain: a. Pendekatan Persuasif.

Membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketahanan wilayah sesuai dengan kapasitas dan profesi masing-masing. b. Pendekatan Pragmatif. Mendorong masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam kegiatan konkret yang mendukung stabilitas sosial dan ketahanan wilayah. c. Pendekatan Komunikatif. Mengutamakan dialog dan diskusi terbuka antara Babinsa dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan ketahanan, kewaspadaan, dan kebangsaan secara inklusif.

Pembinaan Komunikasi Sosial (Komsos)

Babinsa sebagai pelaksana Komsos bertugas menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kesadaran bela negara. Bentuk kegiatan Komsos antara lain: a. Dialog dan diskusi kelompok; b. Penyuluhan melalui media seni dan olahraga; c. Pelibatan dalam forum masyarakat serta lembaga adat. Strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat secara lintas sektor, sehingga memperkuat ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan wilayah.

Perbantuan kepada Pemerintah Daerah

Komando Kewilayahan TNI berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah daerah, terutama: a. Pembangunan infrastruktur melalui TMMD; b. Penanggulangan bencana alam (tanggap darurat dan distribusi

bantuan); c. Edukasi bela negara dan mitigasi konflik sosial. Perbantuan ini memperkuat kemitraan antara TNI dan pemerintah sipil, sekaligus menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung pembangunan nasional dari aspek keamanan dan stabilitas sosial.

Deteksi dan Cegah Dini Ancaman Wilayah

Babinsa sebagai elemen TNI yang melekat langsung di tengah masyarakat memiliki peran vital dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan seperti: Konflik sosial horizontal, Ancaman radikalisme, dan Potensi disintegrasi bangsa. Dengan pendekatan aktif di masyarakat, Babinsa mampu menyampaikan informasi strategis kepada komando atas secara cepat dan akurat, sehingga langkah preventif dapat segera diambil.

Capaian Pembinaan Teritorial

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, Danramil 0620-11/Asjap, dan 32 personel Babinsa, ditemukan bahwa pelaksanaan pembinaan teritorial telah menunjukkan capaian positif sebagai berikut: a. Meningkatnya sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat; b. Terbentuknya daerah-daerah binaan dengan klasifikasi wilayah pertahanan; c. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap program TMMD dan kegiatan bela negara; d. Meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya stabilitas dan keamanan lokal; e.

Penguatan identitas kewilayahan sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta.

PEMBAHASAN

Analisis Peran TNI dalam Mendukung Ketahanan Nasional

Optimalisasi Pembinaan Teritorial oleh TNI AD, khususnya melalui Babinsa di tingkat Kodim dan Koramil, merupakan elemen penting dalam upaya memperkuat Ketahanan Nasional. Objek utama pembinaan ini mencakup potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini diterapkan dalam kerangka sistem pertahanan rakyat semesta yang menekankan sinergi antara TNI dan rakyat.

Salah satu bentuk kontribusi nyata TNI dalam mendukung ketahanan wilayah adalah melalui program Bhakti TNI, yang mencakup kegiatan fisik maupun non-fisik. Dalam bidang fisik materiel, TNI secara aktif membangun infrastruktur di daerah tertinggal dan rawan, seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum melalui kegiatan Karya Bhakti dan Operasi Bhakti. Di sisi lain, pendekatan non-fisik difokuskan pada penguatan mental spiritual masyarakat melalui kepemimpinan lapangan dan komunikasi sosial yang intensif antara TNI dan masyarakat.¹²

¹² Lihat: "Bhakti TNI merupakan salah satu upaya mendayagunakan kedudukan dan kemampuan TNI sebagai kekuatan pertahanan..." dalam bahan penelitian, subbab 4.2.1.

Dalam konteks ideologis, TNI menjalankan peran strategis dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk menangkal paham radikalisme dan disintegrasi bangsa, terutama kepada generasi muda. Di ranah sosial-politik, keberadaan TNI terbukti penting dalam menjaga stabilitas selama pemilu maupun dalam mediasi konflik horizontal. Sementara itu, melalui program TMMD dan kegiatan Karya Bakti, TNI turut mendorong ketahanan ekonomi dengan membantu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Di aspek pertahanan dan keamanan, TNI terus melaksanakan operasi teritorial dan pelatihan bela negara bersama masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bentuk ancaman.¹³

Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi optimalisasi pembinaan teritorial TNI didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain struktur komando yang terintegrasi dari Kodam hingga Babinsa, sinergi dengan pemerintah daerah, serta kepercayaan tinggi masyarakat terhadap institusi TNI. Babinsa sebagai ujung tombak Komando Kewilayahan memainkan peran penting dalam menjembatani

aspirasi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional dari tingkat desa.¹⁴

Namun demikian, pelaksanaan tugas ini tidak lepas dari hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia terutama di daerah terpencil, serta potensi ketidakharmonisan koordinasi antara lembaga di tingkat daerah. Selain itu, netralitas TNI juga kerap menghadapi tantangan dari upaya politisasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Kodim 0620/Kab Cirebon dan Danramil 0620-11/Asjap, diketahui bahwa peran Babinsa sangat efektif dalam menjalin komunikasi sosial, meredam potensi konflik horizontal, serta menjaga stabilitas wilayah. Pemerintah Daerah, Polri, dan tokoh masyarakat juga mengakui peran penting TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam mendukung ketahanan nasional, terutama di wilayah pasca-konflik.¹⁵

Optimalisasi pembinaan teritorial dilakukan melalui pendekatan yang adaptif pada tiga sektor utama: geografi, demografi, dan kondisi sosial. Dalam konteks geografi, pemilihan wilayah sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan stabilitas daerah.

¹³ Lihat: "Hasil wawancara dengan Komandan Kodim 0620/Kab Crb (Dandim) dan Komandan Koramil 6020-11/Asjap (Danramil) menunjukkan..." dalam bahan penelitian, subbab 4.2.3.

¹⁴ Pusat Teritorial TNI AD, *Doktrin Pembinaan Teritorial TNI Angkatan Darat (Binter TNI AD)* (Jakarta: Mabesad, 2018).

¹⁵ Pusat Pengkajian Strategi TNI, *Kajian Netralitas TNI dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan* (Jakarta: Mabes TNI, 2021).

Pendekatan bottom-up dari desa hingga kabupaten diintegrasikan melalui forum seperti Rakorbangda untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan pertahanan wilayah.¹⁶

Kriteria wilayah prioritas meliputi desa rawan bencana, daerah miskin dan terpencil, serta wilayah yang memiliki potensi kerawanan ideologis, politik, dan keamanan. Penentuan Daerah Pangkal Perlawanan dan klasifikasi daerah dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, pelatihan bela negara, serta kegiatan komunikasi sosial. Selain itu, analisis medan tempur dan jalur logistik juga menjadi dasar dalam pemetaan strategi pertahanan.¹⁷

Dalam bidang demografi, upaya pembinaan teritorial diarahkan pada pendataan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat untuk mendukung kebutuhan pertahanan. Program pelatihan vokasional serta pendidikan bela negara dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Babinsa melalui penyuluhan dan pelatihan masyarakat. Kegiatan ini juga diarahkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memperkuat semangat nasionalisme.¹⁸

Penanaman nilai kebangsaan dilakukan melalui pengenalan keragaman budaya, penghormatan terhadap simbol negara, serta peningkatan wawasan kebangsaan dalam masyarakat. Semangat ini diarahkan untuk memperkuat solidaritas nasional serta meningkatkan kesiapan rakyat dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dengan pendekatan ini, TNI berperan sebagai penangkal sekaligus penindak dalam menghadapi ancaman keamanan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁹

Kondisi politik nasional yang stabil saat ini memberikan ruang yang besar bagi pelaksanaan pembinaan teritorial secara optimal, terutama di wilayah pelosok. Pemerintah daerah diharapkan terus bersinergi dalam menyediakan sarana transportasi dan dukungan fasilitas lainnya guna menunjang kegiatan Babinsa dalam menjalankan fungsinya di lapangan.²⁰

D. Kesimpulan dan Saran

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

¹⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon, *Laporan Rakorbangda 2023: Sinkronisasi Pertahanan dan Pembangunan Daerah* (Cirebon: Bappeda Kab. Cirebon, 2023).

¹⁷ TNI AD, *Pedoman Penyusunan Wilayah Pertahanan Darat* (Jakarta: Mabesad, 2021).

¹⁸ Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI, *Modul Pendidikan Bela Negara*

untuk Masyarakat Sipil (Jakarta: Kemhan RI, 2020).

¹⁹ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Era Globalisasi* (Jakarta: Lemhannas Press, 2021).

²⁰ Pemerintah Kabupaten Cirebon, *Nota Kesepahaman dan Kerja Sama antara Pemkab Cirebon dan Kodim 0620 Tahun 2023* (Cirebon: Setda Kab. Cirebon, 2023).

Indonesia (NKRI) melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu peran penting TNI adalah melalui Komando Kewilayahan yang dijalankan oleh Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial untuk menciptakan Ketahanan Wilayah sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dalam pelaksanaannya, TNI memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai aspek Ketahanan Nasional, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keterlibatan aktif dalam program-program seperti TMMD, Karya Bhakti, dan Pendidikan Bela Negara memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesadaran berbangsa. Namun demikian, pelaksanaan peran TNI sebagai Komando Kewilayahan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya personel di daerah terpencil, serta tantangan menjaga netralitas di tengah dinamika sosial politik. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi kewilayahan TNI sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat serta dukungan regulasi dan sumber daya yang memadai.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas peran TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam mendukung Ketahanan Nasional, diperlukan

penguatan kapasitas personel teritorial, terutama Babinsa, baik dalam aspek jumlah, pelatihan, maupun kesejahteraan. Sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat harus diperkuat dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Edukasi bela negara dan wawasan kebangsaan perlu diperluas hingga ke tingkat desa untuk membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya pertahanan negara. Selain itu, penting dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap netralitas dan profesionalisme TNI di lapangan guna menjaga kredibilitas institusi. Semua langkah tersebut harus didukung oleh kebijakan umum pertahanan negara yang jelas, terintegrasi, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta dinamika ancaman global dan domestik.

Daftar Pustaka

Amirudin, Darajat, J., Wajid, F., & Karim, A. (2023). Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism. *Jurnal Penelitian*, 20(1), 67–80. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). *Komentar Atas Undang-Undang Wilayah Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., & Karim, A. (2024). Developoing leadership behavior through natural school. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 1–20.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>
DESENVOLVENDO
- Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan, M., & Karim, A. (2023). Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Muftadi-ien in Indramayu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 153–160.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., & Sumiati, A. (2021). Spiritual leadership: The case of instilling values in students through the Kiai's program in the globalization era. *Journal of Leadership in Organizations*, 3(1), 16–30.
<https://doi.org/10.22146/jlo.63922>
- Hamamah, F. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015).
- Hamamah, F. "E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–246.
- Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 1 (2020): 1–9.
- Hamamah, F. "Rehabilitation on Victims of Drugs Abuse in Judicial Development." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 354–366.
- Hamamah, F., and B. Heru. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cendekia Jaya* 2 (2019): 73–98.
- Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiyanti, D., & Karim, A. (2023). Character building management in improving personality competence teacher. *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research*, 8(2), 49–64.
<https://doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>
- Karim, A., Mardhotillah, N. F., & Samadi, M. I. (2019). Ethical leadership transforms into ethnic: Exploring new leader's style of Indonesia. *Journal of Leadership in Organizations*, 1(2), 146–157.

<https://doi.org/10.22146/jlo.44625>

Lisyanti, Mehiri, S., Cahyono, H., & Karim, A. (2022). Commitment to the Profession and the Learning Organization the Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School. *SCIENTIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021)*, 296–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>

Mansir, F., & Karim, A. (2020). Fiqh learning methodology in responding social issues in Madrasa. *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society*, 7(2), 241–251. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>

Nugroho, A. (2017). Peran TNI dalam Ketahanan Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: LKiS.

Nurhawaeny Kardiyati, E., & Karim, A. (2023). Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency. *Business and Accounting Research (IJEBAAR) Peer Reviewed-International Journal*, 7(2), 2023. <https://jurnal.stic-aas.ac.id/index.php/IJEBAAR>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024.

Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., & Karim, A. (2024). Principal Leadership And Teacher Performance On Student Success. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 7(2), 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>

Qodriah, S. L., Hartati, W., & Karim, A. (2019). Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. *Journal of Leadership in Organizations*, 1(2), 79–95.

Rachman, R. (2015). *Pertahanan Nasional dan Ketahanan Wilayah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, & Jalaludin. (2024). The managerial roles of leaders pesantren-based rehabilitation institutions in overcoming juvenile delinquency. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 08(03), 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>

Simanjuntak, J. (2020). Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Ketahanan Wilayah. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 145-160.

Supriyadi, E. (2018). *Netralitas TNI dan Profesionalisme di Era Demokrasi*. Jakarta: LIPI Press.

Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., & Sahil, A. (2021). Communicative cultural dakwah of Abdurrahman Wahid in pluralistic society. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(2), 1–33. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., & Karim, A. (2022). Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School. *Journal of Leadership in Organizations*, 4(2), 179–190. <https://doi.org/10.22146/jlo.74872>